



Penguatan BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa Kalbar

# 11 BUMD Merugi dan Beban Pemda

**PONTIANAK** - Bertempat di Aula Kantor Bank Kalbar, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan dan BUM Desa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat, Kamis (10/10).

Dalam kegiatan ini, dia mengingiri agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui Kepala Desa maupun pengurus Bumdes benar-benar mampu melihat potensi yang ada di daerah mereka.

"Mereka harus berjiwa entrepreneurship dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa misalnya dapat menarik pendapatan untuk Bumdes yang pada akhirnya menjadi besar dan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa itu juga dapat meningkatkan peran serta Bumdes dalam menyejahterakan masyarakat di desa-desa. Itu yang kita mau sebenarnya," harisnya.

Tak hanya itu untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) juga harus benar-benar memperhatikan dan mempunyai target-target kinerja yang jelas dan harus dicapai.

"Harus konsentrasi di situ. Karena kalau sudah BLUD di BUMD kita harus benar-



**HADIR:** Harisson menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan dan BUM Desa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat.

benar mengoptimalkan sumber daya yang ada di badan usahanya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada Workshop dan Coffee Talk mengatakan, pemerintah membentuk korporasi daerah dan desa dalam bentuk BUMD, BLUD, dan BUMDesa agar dapat berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kalimantan Barat.

"Guna mendorong hal itu, BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat sangat memerlukan penguatan tata kelola korporasi (corporate governance), termasuk dalam hal manajemen risiko. Dengan demikian, BUMD, BLUD Kes-

ehatan, dan BUMDesa bisa dijalankan secara profesional, semakit akuntabel, dan bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

Disampaikannya, Workshop dan CoffeeTalk dilakukan karena BPKP menemukan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat dalam pembangunan nasional terbilang rendah.

Buktinya, dari 25 BUMD se-Kalimantan Barat, baru enam BUMD yang mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, BPKP menemukan 11 BUMD yang mengalami kerugian dan membebani pemerintah daerah pada tahun 2023.

BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) juga belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, salah satu-

nya pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan yang masih belum sesuai dengan standar. Demikian dengan BUMDesa. Mereka mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan malah kebanyakan membebani desa.

"Dari Workshop dan CoffeeTalk ini, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas," pungkasnya.

Workshop dihadiri oleh para kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat. (mse/r)